

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah memiliki peran sebagai aktor sekaligus sebagai fasilitator dalam menggerakkan roda perekonomian. Peran sebagai aktor dilakukan pemerintah terutama menyangkut belanja-belanja yang mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian baik ditingkat nasional maupun lokal, misal melalui pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan sarana publik yang vital. Sementara itu peran sebagai fasilitator ditunjukkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang kondusif terhadap pembangunan ekonomi baik melalui kebijakan fiskal maupun non fiskal. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya.

Kabupaten Kulon Progo saat ini sedang mengalami perkembangan pesat pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata yang saat ini sedang banyak dikunjungi wisatawan yaitu wisata alam Kalibiru. Perkembangan sektor

wisata ini tidak lepas dari peran pemerintah dan masyarakat yang bekerjasama untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Kulon Progo. Peningkatan pariwisata di Kabupaten Kulon Progo sangat berdampak positif bagi pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat Kulon Progo. Dengan berkembangnya sektor pariwisata dan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Kulon Progo, masyarakat yang dulu mengandalkan sektor pertanian sebagai pekerjaan pokok saat ini dapat menambah penghasilan dengan cara berdagang menjajakan barang-barang atau makanan khas Kulon Progo di tempat wisata. Selain itu masyarakat Kulon Progo juga bergerak dibidang jasa seperti persewaan spot foto serta jasa parkir.

Perkembangan sektor pariwisata ini diharapkan mampu mendukung perkembangan pembangunan daerah dengan cara usaha ekonomi daerah Kabupaten Kulon Progo, serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan wisata yang mempunyai kontribusi terhadap perkembangan kawasan wisata dan memberi kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah secara otomatis akan meningkat pesat. Meningkatnya pendapatan asli daerah ini akan menjadi tanggungjawab yang besar bagi pemerintah didalam mengelola laporan keuangan Kabupaten Kulon Progo, karena seperti yang dijelaskan diatas peningkatan pendapatan asli daerah tidak jauh dari kontribusi masyarakat sekitar kawasan wisata, maka pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan apa yang telah masyarakat berikan untuk pengembangan kawasan wisata tersebut. Salah satu

bentuk pertanggungjawaban pemerintah dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wisata.

Keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu lembaga atau organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan.

Untuk dapat semakin berkembang, khususnya pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus mencermati dan menganalisis kinerja pemerintah, salah satunya adalah dengan melakukan analisis kinerja dari sisi keuangan terhadap laporan keuangan. Cara yang paling banyak digunakan untuk

menganalisis laporan keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah.

Penggunaan analisis rasio keuangan pada organisasi sektor publik, khususnya Pemda belum banyak dilakukan, tidak seperti untuk sektor privat yang sudah sering dilakukan. Hal tersebut dikarenakan :

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi Pemda yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh organisasi yang bersifat privat.
2. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2011-2015”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, masalah yang dapat dirumuskan penulis adalah: “Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 2011-2015 berdasarkan indikator analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan?”

## **1.3 Batasan Masalah**

1. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 2011-2015.
2. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dilihat dari hasil perhitungan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Kinerja Keuangan pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masa yang akan datang.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban APBD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

### c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Akuntansi Sektor Publik.

### d. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan bagaimana cara menghitung analisis laporan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai adalah “Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2011-2015 berdasarkan indikator analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan”.